



Buku Profil Lahan

BUSINESS MATCHING

2025

Lahan Aset
Pemerintah Daerah
untuk
Pembangunan
Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Buku Profil Lahan

BUSINESS MATCHING

2025

Lahan Aset
Pemerintah Daerah
untuk
Pembangunan
Perumahan Perdesaan



Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Buku Profil Lahan Business Matching 2025: Lahan Aset Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Perumahan Perdesaan

Pengarah

Yunianto Rahadi Utomo

Penyusun

Hardi Prasetya Risman

Akmal Kurnia Ramadhan

Aldi

Aulia Sekar Widyana

Badar Jamaludin

Ferry Mursidan Mansyur

Fredita Istijarningsih

Muhammad **Bayu** Rizqyputra

Nisurali Intaro Gan-Go Tarigan

Oki Riyartono

Popy Afriyanti

Syahid Muhammad **Ridha**

Subdirektorat Penyiapan Lahan dan Perizinan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daftar Isi

06 Kata Pengantar

Direktur Jenderal Perumahan
Perdesaan Kementerian PKP

A.

Program 3 Juta Rumah dan Kementerian PKP

08 A-1. Latar Belakang

09 A-2. Fungsi Kementerian PKP dalam Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

10 A-3. Target Program 3 Juta Rumah

12 A-4. Rencana dan Upaya Program 3 Juta Rumah

B.

Penyiapan Lahan Perumahan Perdesaan

14 Alur Penyiapan Lahan Perumahan Perdesaan

C.

Profil Lahan Aset Pemda untuk Perumahan, Business Matching 2025

18 Daftar Lahan yang Disajikan Dalam Kegiatan Business Matching

D.

Penutup

46 Penutup



Kata Pengantar

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Profil Lahan Business Matching 2025 ini dapat diselesaikan untuk Kegiatan Business Matching Lahan Aset Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Perumahan Perdesaan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini, baik dari unsur Pemerintah Daerah selaku pemilik lahan, para pengembang perumahan, lembaga pembiayaan, maupun organisasi dan lembaga lain yang turut serta dalam upaya memperkuat ekosistem pembangunan perumahan di wilayah perdesaan.

Kegiatan Business Matching Lahan Aset Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Perumahan Perdesaan memiliki arti penting dan strategis dalam mempertemukan Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan penyediaan dan pembangunan perumahan di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah memiliki peran dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Amanat tersebut menegaskan bahwa penyediaan hunian layak menjadi tanggung jawab negara dalam memastikan setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan Buku Profil Lahan Business Matching 2025. Semoga kegiatan Business Matching ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan.

Jakarta, November 2025



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



A.

Program 3 Juta Rumah dan Kementerian PKP

“...cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, bangsa yang baldatun thoyyibatun warobbun ghofur, bangsa dimana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan.”

**Prabowo Subianto
Presiden RI**



A-1. Latar Belakang

Program 3 Juta Rumah menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 01 **UUD 1945
Pasal 27
(2)** “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, yang menjadi dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan.
- 02 **UUD 1945
Pasal 28H
(1)** “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- 03 **RPJMN
2025 –
2029** Program Pembangunan 3 Juta Rumah ditetapkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Nomor 13 dan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) No. 7 dalam RPJMN 2025 – 2029 (Perpres No.12 Tahun 2025) .
- 04 **Output** Program ini diarahkan untuk mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan (9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah) dan backlog kelayakan (26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni) (Susenas, 2023).
- 05 **Outcome**
 - 1. Menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak, sanitasi memadai, dan lingkungan sehat;
 - 2. Meningkatkan kesehatan keluarga dan kualitas hidup;
 - 3. Menyediakan lapangan kerja luas, termasuk bagi pekerja formal dan informal;
 - 4. Menggerakkan 185 subsektor ekonomi terkait industri perumahan (LPEM UI, 2023).

Pembangunan 3 Juta Rumah diproyeksikan memberi kontribusi sekitar 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagaimana mandat Asta Cita Presiden (No. 3, 6, 8).



A-2. Fungsi Kementerian PKP dalam Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

Operator

Menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan, seperti:



Kementerian PKP sebagai Operator akan melanjutkan pembangunan rumah susun dan rumah khusus serta revitalisasi rumah susun.

Regulator

Menyusun regulasi dan/atau memberikan kemudahan/ percepatan perizinan yang berkaitan dengan perumahan



Kementerian PKP sebagai Regulator telah melakukan Pembebasan biaya BPHTB, Pembebasan Retribusi PBG, dan Percepatan PBG untuk Pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari sejak dokumen permohonan lengkap.

Fasilitator

Memberikan kemudahan yang berkaitan dengan perumahan



Kementerian PKP sebagai Fasilitator telah melakukan percepatan pemanfaatan Rusun Pasar Rumput, Penyaluran Rumah KPR Bersubsidi, Peninjauan & relokasi warga kolong jembatan.

A-3. Target Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah merupakan upaya pembangunan baru dan renovasi rumah di seluruh Indonesia. Target ini dibagi ke dalam tiga delineasi wilayah, yaitu perkotaan (105 Kotamadya), perdesaan (221 Kabupaten), dan pesisir (189 Kabuapten).

Provinsi Aceh

Kab. Aceh Tenggara
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Besar
Kab. Pidie
Kab. Aceh Utara
Kab. Gayo Lues
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Bener Meriah

Provinsi Sumatera Utara

Kab. Tapanuli Utara
Kab. Tobo
Kab. Labuhan Batu
Kab. Asahan
Kab. Simalungun
Kab. Dairi
Kab. Karo
Kab. Deli Serdang
Kab. Langkat
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Samosir
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Padang Lawas
Kab. Labuhan Batu Selatan
Kab. Labuhan Batu Utara

Provinsi Sumatera Barat

Kab. Solok
Kab. Sijunjung
Kab. Tanah Datar
Kab. Agam
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Pasaman
Kab. Solok Selatan
Kab. Dharmasraya

Provinsi Riau

Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Pelalawan
Kab. Siak
Kab. Kampar
Kab. Rokan Hulu
Kab. Bengkalis
Kab. Rokan Hilir

Provinsi Jambi

Kab. Kerinci
Kab. Merangin
Kab. Sarolangun
Kab. Batang Hari
Kab. Muaro Jambi
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kab. Tebo
Kab. Bungo

Provinsi Sumatera Selatan

Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Muara Enim
Kab. Lahat
Kab. Musi Rawas
Kab. Musi Banyuasin
Kab. Banyu Asin
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Kab. Ogan Ilir
Kab. Empat Lawang
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Kab. Musi Rawas Utara

Provinsi Bengkulu

Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Rejang Lebong
Kab. Lebong
Kab. Kepahiang

Provinsi Lampung

Kab. Lampung Barat
Kab. Lampung Tengah
Kab. Lampung Utara
Kab. Way Kanan
Kab. Tulangbawang
Kab. Pesawaran
Kab. Pringsewu
Kab. Mesuji
Kab. Tulang Bawang Barat

Provinsi Banten

Kab. Lebak
Kab. Tangerang
Kab. Serang

Provinsi Jawa Barat

Kab. Bogor
Kab. Sukabumi
Kab. Cianjur
Kab. Bandung
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya
Kab. Ciamis
Kab. Kuningan
Kab. Majalengka
Kab. Sumedang
Kab. Subang
Kab. Purwakarta
Kab. Karawang
Kab. Bekasi
Kab. Bandung Barat

Provinsi Jawa Tengah

Kab. Cilacap
Kab. Banyumas
Kab. Purbalingga
Kab. Banjarnegara

Kab. Kebumen
Kab. Purworejo
Kab. Wonosobo
Kab. Magelang
Kab. Boyolali
Kab. Klaten
Kab. Sukoharjo
Kab. Wonogiri
Kab. Karanganyar
Kab. Sragen
Kab. Grobogan
Kab. Blora
Kab. Pati
Kab. Kudus
Kab. Demak
Kab. Semarang
Kab. Temanggung
Kab. Kendal
Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang

Kab. Tegal
Kab. Brebes

Provinsi DI Yogyakarta

Kab. Kulon Progo
Kab. Bantul
Kab. Gunung Kidul
Kab. Sleman

Provinsi Jawa Timur

Kab. Pacitan
Kab. Ponorogo
Kab. Trenggalek
Kab. Tulungagung
Kab. Blitar
Kab. Kediri
Kab. Malang
Kab. Lumajang
Kab. Jember
Kab. Bondowoso

221 Kabupaten delineasi perdesaan

yang menjadi kewenangan Direktorat
Jenderal Perumahan Perdesaan

Kab. Pasuruan
Kab. Sidoarjo
Kab. Mojokerto
Kab. Jombang
Kab. Nganjuk
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Ngawi
Kab. Bojonegoro
Kab. Lamongan
Kab. Gresik

Provinsi Bali

Kab. Tabanan
Kab. Badung
Kab. Gianyar
Kab. Bangli

Provinsi Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang
Kab. Landak
Kab. Sanggau
Kab. Ketapang
Kab. Sintang
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Sekadau
Kab. Melawi

Provinsi Kalimantan Tengah

Kab. Kotawaringin Barat

Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Kapuas
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Utara
Kab. Sukamara
Kab. Lamandau
Kab. Seruyan
Kab. Katingan
Kab. Pulang Pisau
Kab. Gunung Mas
Kab. Barito Timur
Kab. Murung Raya

Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Tapin
Kab. Hulu Sungai Selatan

Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Balangan

Provinsi Kalimantan Timur

Kab. Paser
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kab. Berau
Kab. Mahakam Hulu

Provinsi Kalimantan Utara

Kab. Malinau
Kab. Tana Tidung
Kab. Nunukan

Provinsi Sulawesi Tengah

Kab. Sigi

Provinsi Sulawesi Selatan

Kab. Soppeng
Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Enrekang
Kab. Tana Toraja
Kab. Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe
Kab. Kolaka Timur

Provinsi Gorontalo

Kab. Pohuwato

Provinsi Sulawesi Barat

Kab. Polewali Mandar
Kab. Mamasa

Provinsi Papua Barat

Kab. Teluk Bintuni
Kab. Pegunungan Arfak

Provinsi Papua Barat Daya

Kab. Maybrat

Provinsi Papua

Kab. Keerom
Kab. Mamberamo Raya

Provinsi Papua Selatan

Kab. Boven Digoel
Kab. Mappi
Kab. Asmat

Provinsi Papua Selatan

Kab. Paniai
Kab. Mimika
Kab. Dogiyai
Kab. Intan Jaya
Kab. Deiyai
Kab. Puncak
Kab. Puncak Jaya

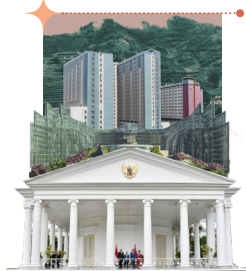
Provinsi Papua Pegunungan

Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Yahukimo
Kab. Tolikara
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Yalimo
Kab. Nduga
Kab. Lanny Jaya

A-4. Rencana dan Upaya Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keterjangkauan, pemerataan, serta keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.

Rencana



Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rusus, Rusun, BSPS, Penanganan Kumuh, APBD, APBDes, DAK, Pembiayaan Mikro, RTLH Kemensos dan FLPP



Pengembang/ Developer

Pembangunan oleh Pengembang/Developer meliputi, Sederhana Non-FLPP, Menengah Mewah, BI, dan Investasi Luar Negeri.



Swadaya

Rakyat Membangun dan Merenovasi Rumah dengan Biaya Sendiri



Gotong Royong

Pembangunan dan Renovasi secara Gotong Royong oleh pengusaha melalui CSR dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

- Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk **menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP** dan Rumah Komersial.
- Pembangunan Rumah MBR dengan **pemanfaatan tanah milik negara.**
- Memastikan ketepatan sasaran dengan **Data DTSEN.**
- Melakukan inisiasi pembentukan **Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3).**
- Strategis Nasional (PSN) berbasis program.
- Dukungan para stakeholder melalui **kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan.**
- Investasi Luar Negeri** untuk sektor perumahan.



B.

Penyiapan lahan Perumahan Perdesaan

“Ada skema lahan, kalau lahannya milik negara seperti apa. Ada juga skema pembiayaan, skema hunian, rencana desain, hingga skema kepemilikan. Kami akan mengundang rektor-rektor, pihak perbankan, dan para developer, agar interaksi dan kolaborasi dapat berlangsung lebih efektif dan produktif.”

Maruarar Sirait
Menteri PKP



B-1. Alur Penyiapan Lahan

01

Data Sumber Lahan / Pengusulan

Sumber data dapat berasal dari Badan Bank Tanah, Kementerian ATR/BPN, maupun dari usulan pembangunan perumahan oleh Pemerintah Daerah.

Penyampaian usulan atau data lahan memerlukan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. **Bukti legalitas** kepemilikan lahan; dan
2. **Informasi lokasi** administratif, koordinat geografis, serta delineasi lahan yang diusulkan.



02

Identifikasi & Inventarisasi

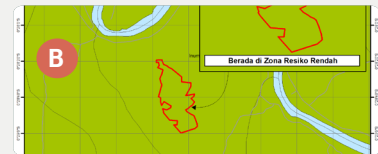
Desk Study: Overlay

Untuk mengetahui kesesuaian data/usulan lahan dengan regulasi tata ruang yang berlaku, data tersebut di-overlay dengan data-data spasial berikut:



Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

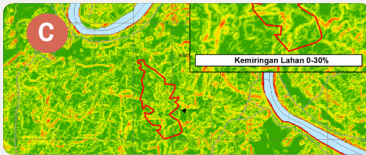
Sumber data Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah



Kawasan Rawan Bencana

Sumber data BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jenis Bencana: **Gempa Bumi, Likuefaksi, Banjir, Letusan Gunung Api, dan Tanah Longsor**

Jika memenuhi kriteria,
menuju proses selanjutnya



Kemiringan Lahan

Sumber data Badan Informasi Geospasial



Kawasan Hutan

Sumber data Kementerian Kehutanan



Kedekatan dengan Fasilitas Umum

Sumber data Google Maps

Overlay data spasial

Hasil overlay diatas merupakan data dan informasi awal untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan survei lapangan



Kajian awal ketersediaan fasilitas

Pemetaan awal ketersediaan fasilitas umum menggunakan google my maps dilakukan pada:



Fasilitas umum dengan rute terdekat dan waktu tempuh tercepat dari lokasi pembangunan perumahan



Pemetaan awal dilakukan pada jam puncak kesibukan, menyesuaikan wilayah pembangunan perumahan

Jika Data/Usulan lahan memenuhi kriteria di proses Identifikasi dan Inventarisasi maka selanjutnya dilakukan verifikasi teknis dengan metode survey lapangan. Beberapa hal yang dilakukan saat verifikasi lahan adalah sebagai berikut:

- A** Pengecekan kondisi eksisting dengan data dan informasi awal hasil desk study

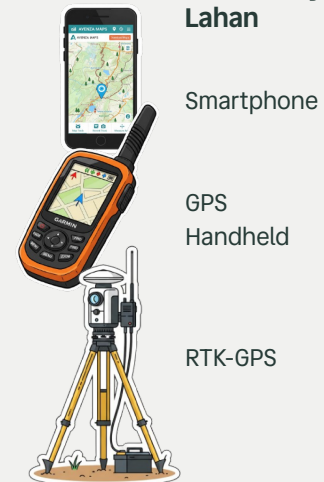


- B** Penelusuran batas-batas terluar calon lokasi
Menggunakan GPS Handheld/RTK-GPS/Aplikasi Smartphone



- I** Petugas survei melakukan penelusuran batas-batas lahan menggunakan aplikasi Smartphone/GPS/RTK-GPS bersama pihak terkait
- II** Petugas survei mengambil foto dan titik koordinat batas-batas terluar sesuai dengan bentuk lahan
- III** Petugas survei mencatat dan melampirkan foto dan koordinat bbatas-batas terluar lahan kedalam formulir dan berita acara kunjungan lapangan
- IV** Titik koordinat ditulis dengan format Degree, Minute, Second (DMS) atau Decimal Degree (DM)

Alat Survey Lahan



Smartphone

GPS
Handheld

RTK-GPS

C Pemetaan kondisi eksisting menggunakan drone



- ✓ **Kecepatan dan Efisiensi Waktu Tinggi**
Drone mampu mencakup area lahan yang luas dalam waktu yang relatif singkat
- ✓ **Akurasi dan Resolusi Data Superior**
Drone dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi yang menghasilkan foto udara dengan resolusi spasial sangat tinggi. Ini memungkinkan identifikasi objek di lapangan dengan sangat detail, seperti batas persil, saluran air, dan fitur kecil lainnya
- ✓ **Fleksibilitas dan Data Real-Time**
Drone dapat diterbangkan kapan saja (tergantung cuaca) untuk mendapatkan data real-time. Ini penting untuk proyek yang membutuhkan pemantauan perubahan yang cepat, seperti proyek konstruksi
- ✓ **Akses ke Area yang Sulit dan Berbahaya**
Drone dapat menjangkau area dengan topografi yang sulit (bukit curam, pegunungan, rawa-rawa, atau hutan lebat) tanpa mengorbankan keselamatan personel survei

C. Profil Lahan Aset Pemda untuk Perumahan, Business Matching 2025

C-1. Daftar Lahan yang Disajikan Dalam Kegiatan Business Matching

Bagian ini memuat daftar lahan yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah dan melalui proses identifikasi, inventarisasi, serta verifikasi teknis. Data disajikan untuk memberikan gambaran awal potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan perdesaan melalui kegiatan Business Matching 2025.

No	Kode	Lokasi	Pemda Pengusul	Luas (Ha)	Status Tanah	Usulan
1	SBG-01	Desa Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang	Subang	14,25	Hak Pakai, Hak Milik dan Dalam Proses Sertipikasi	Perumahan ASN
2	KTS-01	Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi	Kuantan Singingi	43,39	Tanah Milik Masyarakat yang dihibahkan ke Pemerintah Desa	Relokasi Bencana
3	TBW-01	Desa Manggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang	Tulang Bawang	0,40	Hak Pakai	Relokasi Bencana
4	TBW-02	Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang		4,05	Dalam Proses Sertipikasi	Relokasi dan Perumahan ASN
5	SML-01	Desa Purbasari, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun	Simalungun	9,96	Sebagian terbit Hak Milik, Hak Pakai dan sebagian belum ada Hak Atas Tanah	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil
6	SML-02	Desa Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun		1,96	Dalam Proses Sertipikasi	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil

No	Kode	Lokasi	Pemda Pengusul	Luas (Ha)	Status Tanah	Usulan
7	KLK-01	Desa Tikonu, Wundulako, Kabupaten Kolaka	Kolaka	6,23	Hak Pakai	Perumahan ASN
8	MMS-01	Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa	Mamasa	4,70	Dalam Proses Sertipikasi	Perumahan ASN
9	MMS-05	Desa Orobua Timur, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa		4,00	Sebagian besar belum ada bidang terdaftar. Terdapat 3 SHM kecil	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil
10	MMS-06	Desa Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa		1,00	Ada 2 Hak Milik sudah dibebaskan	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil
11	MMS-07	Desa Buntu Malangka, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa		2,00	2 Bidang Hak Milik	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil
12	MMS-08	Desa Aralle Anak, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa		1,57	Dalam Proses Sertipikasi	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil
13	MMS-09	Desa Balabatu, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat		3,10	Hak Pakai	Perumahan ASN, Subsidi, Komersil
14	KBM-01	Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen	Kebumen	1,60	Hak Pakai	Relokasi Bencana
15	LUT-01	Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara,	Lampung Utara	0,19	Hak Pakai	Rusun ASN
16	LBT-01	Kelurahan Pasir Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten/Kota Lampung Barat	Lampung Barat	0,84	Hak Pakai	Rusun ASN



Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Subang

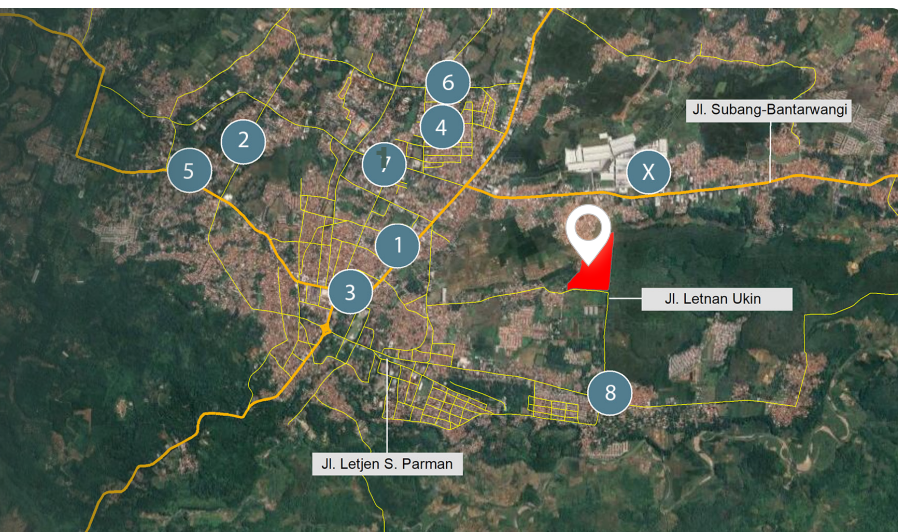
Luas	14,25 ha
Lokasi	Desa Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat
Koordinat	6°34'00.0"S 107°46'54.0"E
Status Kepemilikan	- Hak Pakai no. 11 a.n. Pemkab Subang (± 12,91 Ha) - Hak Milik : 47 bidang (± 0,56 Ha) - Dalam Proses Sertipikasi: 65 bidang (± 0,78 Ha)

SBG-01

14,25 ha
Perumahan ASN

Jarak ke Fasilitas Umum

1	Pusat Kota Subang	3.2 Km
2	SMAN 1 Subang	5.3 Km
3	SMPN 1 Subang	3.0 Km
4	SDN Perumnas 1	4.1 Km
5	RSUD Kabupaten Subang	5.4 Km
6	Terminal Bis Subang	4.6 Km
7	Polres Subang	4.4 Km
8	Universitas Subang	1.4 Km
9	Pusat Pabrik Sepatu	3.4 Km



Kondisi Lahan

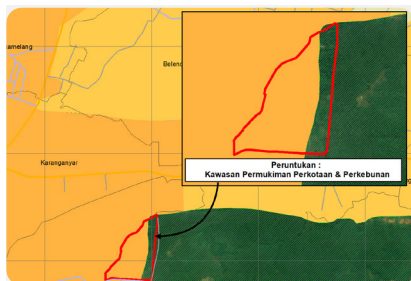


Kondisi Lahan



Kondisi Lahan





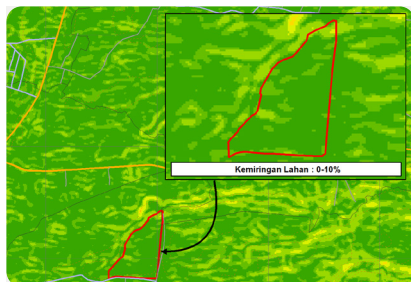
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Soklat berada di lahan peruntukan permukiman perkotaan dan lahan perkebunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 3 Tahun 2014.



LSD

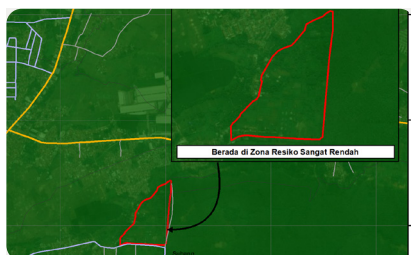
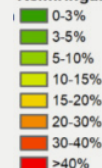
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Soklat, kemiringan berada sekitar 0% hingga 20%. Kemiringan 0-10% seluas 12,77 ha, dan kemiringan 10-15% seluas 1,06 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 0,38 ha. Sebagian besar kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal

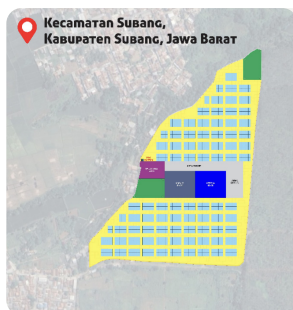
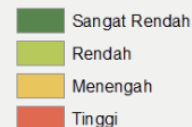
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

zona kawasan rawan gerakan tanah level sangat rendah, sangat sesuai untuk perumahan.

Zona Resiko Gerakan Tanah

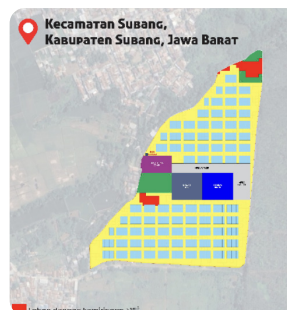


Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan pada lahan datar (cut & fill)

Luas Lahan	14,25 ha
Jumlah Potensi Rumah	836
Luas Kavling	60m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKUMBANG



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan mengikuti kontur (kemiringan <15°)

Luas Lahan	14,25 ha
Jumlah Potensi Rumah	816
Luas Kavling	60m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKUMBANG

Rekomendasi Strategis

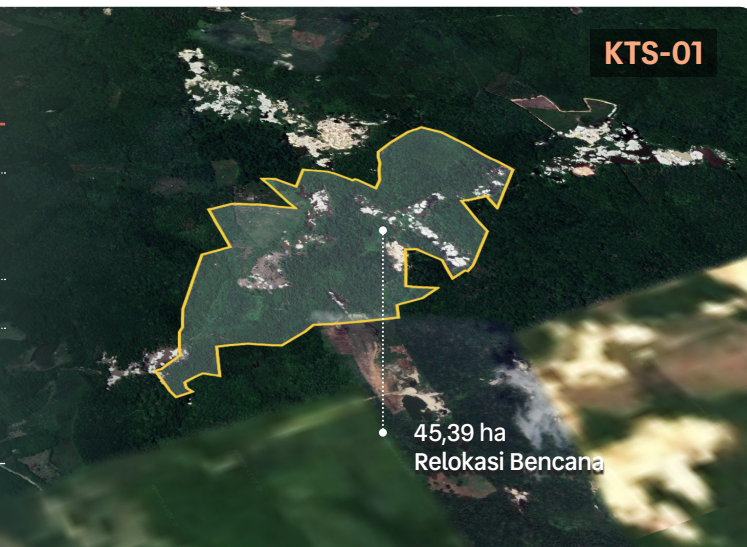
Untuk efisiensi biaya dan kemudahan desain, disarankan memprioritaskan lahan dengan kemiringan $\leq 10\%$ untuk lokasi perumahan ASN.



Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

KTS-01

Luas	45,39 ha
Lokasi	Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi
Koordinat	0°28'06.0"S 101°47'21.4"E
Status Kepemilikan	Tanah Milik Masyarakat yang dihibahkan ke Pemerintah Desa, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hibah Tanah (2 ha)



Jarak ke Fasilitas Umum

1	SDN 007 Desa Pulau Sipan	1.2 Km
2	SMP SATU ATAP Desa Pulau Sipan	1.2 Km
3	SMP 3 Inuman	3.5 Km
4	Kantor Desa Ketaping Jaya Inuman	5.2 Km
5	Pusat Kab. Kuantan Singingi	34.2 Km
6	Pasar Usang Baserah	10.9 Km
7	Puskesmas Baserah	12.6 Km
8	RSUD Teluk Kuantan Kuansing	41.0 Km
9	Kantor Camat Kuantan Hilir	10.5 Km



Kondisi Lahan

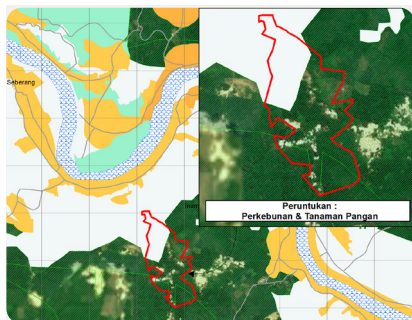


Kondisi Lahan



Calon Penghuni (relokasi)





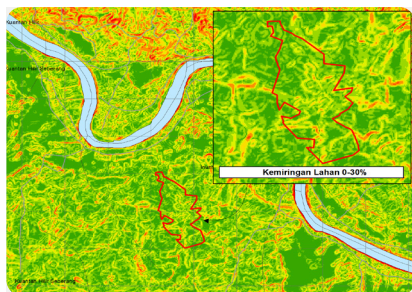
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Pulausipan berada di lahan peruntukan perkebunan dan tanaman pangan sesuai RTRW Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024-2044.



LSD

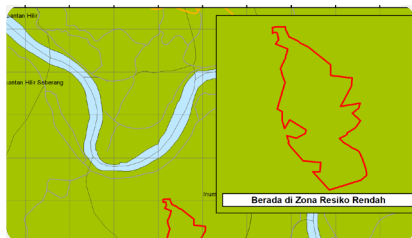
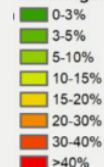
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Pulausipan, kemiringan berada sekitar 0% hingga 30%. Kemiringan 0-10% seluas 36,10 ha, dan kemiringan 10-15% seluas 7,17 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 2,12 ha. Sebagian besar kondisi lahan yang landai ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

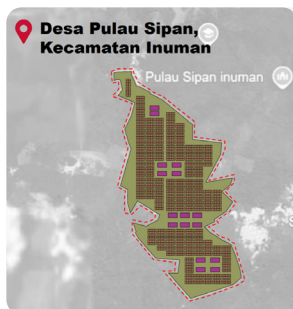
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

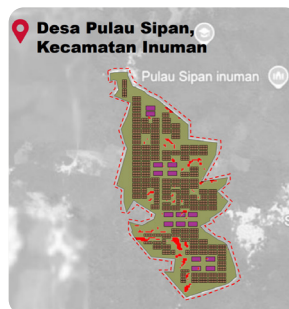
Berada di zona risiko gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan.

Zona Resiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Luas	45.39 Ha
Jumlah Potensi Rumah	1620 Unit
Luas Kavling	108 m2
Kemiringan Lahan	0%



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Luas	45.39 Ha
Jumlah Potensi Rumah	1290 Unit
Luas Kavling	108 m2
Kemiringan Lahan	0% - 15%

Rekomendasi Strategis

Untuk efisiensi biaya dan kemudahan desain, disarankan memprioritaskan lahan dengan kemiringan $\leq 10\%$ untuk relokasi bencana.

Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Luas	0,39 Ha
Lokasi	Desa Manggala Tengah, Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Koordinat	4°29'14.1"S 105°15'26.3"E
Status Kepemilikan	Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

0,39 ha
Relokasi Bencana

Jarak ke Fasilitas Umum

1	Pasar Putri Agung Menggala (Pasar Baru)	80 m
2	Puskesmas Menggala	210 m
3	Kantor Kecamatan Menggala	1.4 Km
4	SDN 01 Menggala Kota	2.2 Km
5	Kantor Kelurahan Menggala Tengah	2.7 Km
6	Masjid Agung Baiturrahman	3.2 Km
7	SMP Negeri 1 Menggala	4.1 Km
8	SMA Negeri 1 Menggala	4.3 Km



Kondisi Lahan

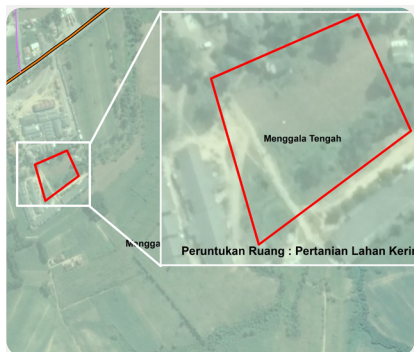


Kondisi Lahan



Pasar di dekat Lokasi





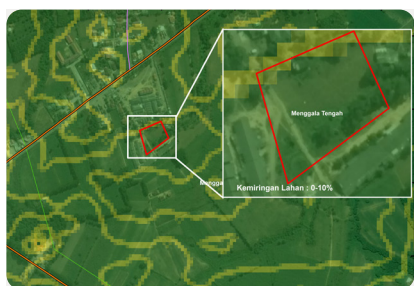
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Menggala Tengah berada di lahan peruntukan pertanian lahan kering sesuai RTRW Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012-2032. Berdasarkan KUPZ, pembangunan di lahan perkebunan diperbolehkan untuk permukiman.



LSD

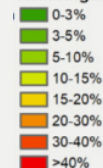
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Untuk Desa Menggala Tengah, kemiringan berada sekitar 0% hingga 10%. Kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

zona kawasan rawan gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Tidak ada syarat khusus, namun tetap ikuti tata ruang.

Zona Resiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan mengikuti kontur (kemiringan <15°)

Luas Lahan	0,39 ha
Jumlah Potensi Rumah	21
Luas Kavling	84m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKUMBANG

Rekomendasi Strategis

Lahan direkomendasikan untuk lokasi relokasi bencana.

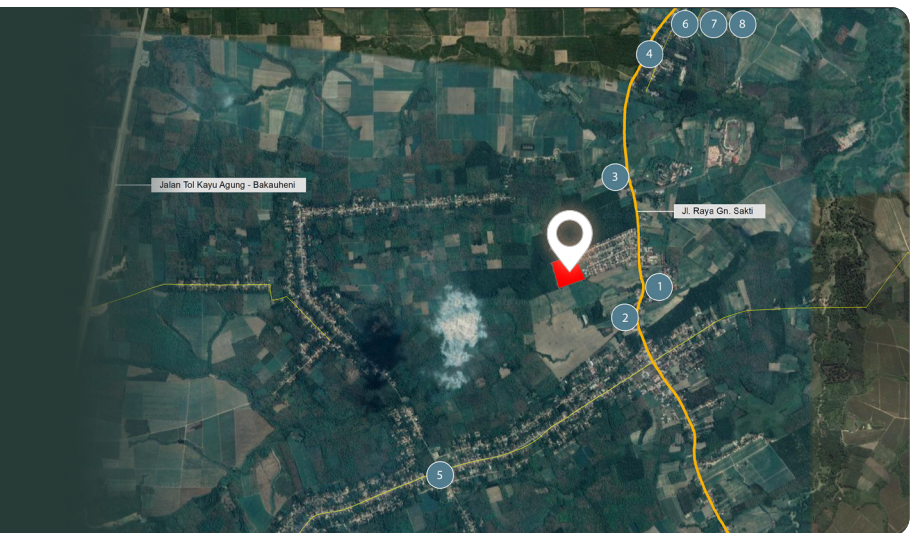
Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Luas	4,05 Ha
Lokasi	Desa Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Koordinat	4°32'44.9"S 105°12'54.7"E
Status Kepemilikan	Dalam proses sertipikasi

4,05 ha
Relokasi dan
Perumahan ASN

Jarak ke Fasilitas Umum

1	RSUD Menggala	1 Km
2	Universitas Megou Pak Tulang Bawang	1.2 Km
3	SMPN 3 Menggala	1.3 Km
4	Masjid Al Hatta Rajasa	2.1 Km
5	Balai Kampung Ujung Gn Ilir	3.5 Km
6	Kantor Kecamatan Menggala	7.7 Km
7	SMA Negeri 1 Menggala	8.6 Km
8	SDN 1 Menggala Kota	10.8 Km

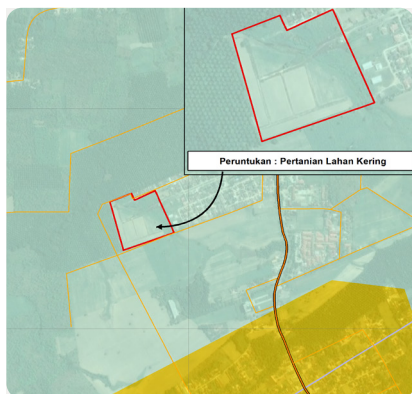


Kondisi Lahan



Kondisi Lahan





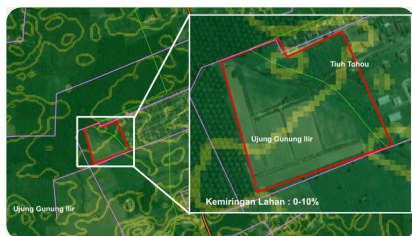
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Ujung Gunung Ilir berada di lahan peruntukan perkebunan Lahan kering sesuai RTRW Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012-2032. Berdasarkan KUPZ, pembangunan di lahan perkebunan diperbolehkan untuk permukiman.



LSD

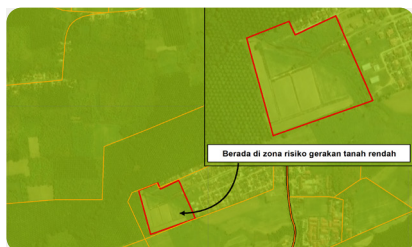
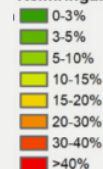
Diluar
Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Untuk Desa Ujung Gunung Ilir, kemiringan berada sekitar 0% hingga 10%. Kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

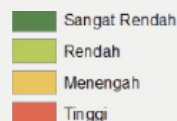
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

zona kawasan rawan gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Tidak ada syarat khusus, namun tetap ikuti tata ruang.

Zona Risiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan mengikuti kontur (kemiringan <15°)

Luas Lahan	4,05 ha
Jumlah Potensi Rumah	280
Luas Kavling	84m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKUMBANG

Rekomendasi Strategis

Lahan direkomendasikan untuk lokasi relokasi dan perumahan ASN.

★ Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Simalungun

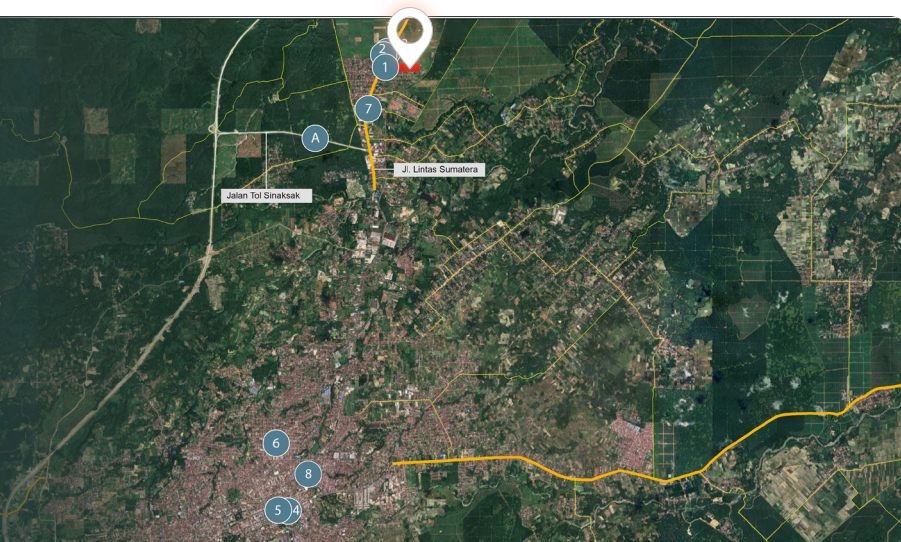
SML-01

Luas	9,96 Ha
Lokasi	Desa Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
Koordinat	3°02'17.2"N 99°05'18.3"E
Status Kepemilikan	- Hak Atas Tanah Dalam Area Usulan Lokasi Pembangunan Perumahan: - Hak Milik 4 Bidang - Hak Pakai 1 Bidang

9,96 Ha
Perumahan ASN,
Subsidi, Komersil

Jarak ke Fasilitas Umum

1	SMK Negeri 3 Pematang-siantar	500 m
2	Kantor Camat Tapian Dolok	900 m
3	Puskesmas Tapian Dolok	1 Km
4	RSUD Dr. Djasemen Saragih	10 Km
5	Pasar Horas	10 Km
6	Polsek Siantar Utara	9.1 Km
7	SDN 091608 Sinaksak	2.2 Km
8	Pusat Kota Pematang Siantar	Km



Kondisi Lahan

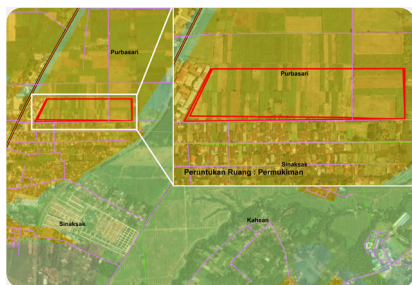


Jalan Lingkungan



Jaringan Listrik





Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Dolok Ulu berada di lahan peruntukan permukiman sesuai RTRW Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031. Sudah sesuai dengan peruntukan.



LSD

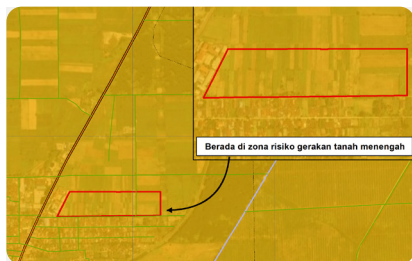
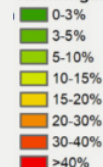
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Untuk Desa Dolok Ulu, kemiringan berada sekitar 0% hingga 15%. Kemiringan 0-10% seluas 9,69 ha, dan kemiringan 10-15% seluas 0,24 ha. Kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

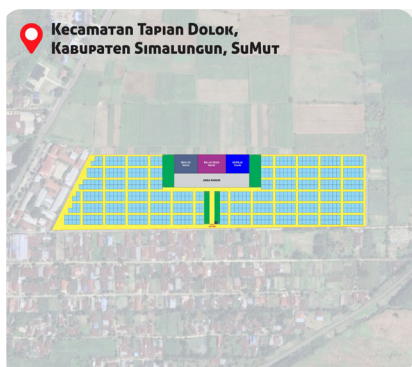
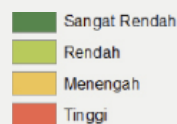
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

Berada di zona risiko gerakan tanah level menengah, cukup sesuai untuk perumahan dan fasilitas umum namun perlu studi geoteknik lebih lanjut

Zona Risiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan mengikuti kontur (kemiringan <15°)

Luas Lahan	9,96 ha
Jumlah Potensi Rumah	450
Luas Kavling	84m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKIMRANG



Rekomendasi Strategis

Untuk efisiensi biaya dan kemudahan desain, disarankan memprioritaskan lahan dengan kemiringan $\leq 10\%$ untuk lokasi perumahan ASN, perumahan subsidi, maupun komersil.

Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Simalungun

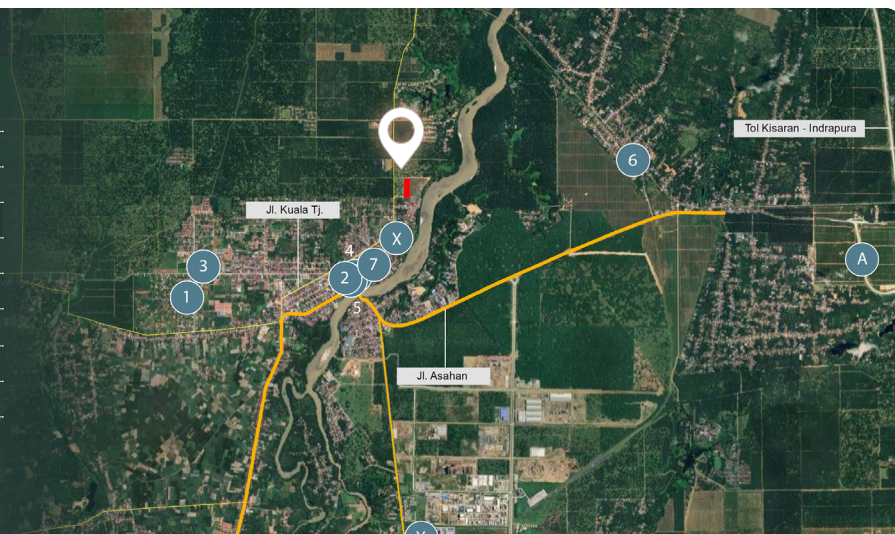
SML-02

Luas	1,96 Ha
Lokasi	Desa Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
Koordinat	3°10'19.0"N 99°20'19.6"E
Status Kepemilikan	Dalam proses pelepasan dari HGU PTPN IV

SML-02
1,96 Ha
Perumahan ASN,
Subsidi, Komersil

Jarak ke Fasilitas Umum

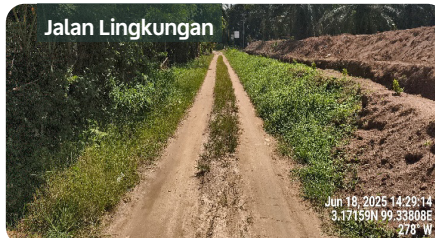
1	Pasar Modern Perdagangan	4,2 km
2	Puskesmas Perdagangan	1,4 km
3	RSUD Perdagangan	3,4 km
4	SD Negeri 091621 Perdagangan	1,4 km
5	SMP Negeri 1 Bandar	1,6 km
6	Stasiun Kereta Api Perlanaan	6,7 km
7	Stadion Kota Perdagangan	1,3 km
8	PT Pantja Surya (Pabrik Karet)	700 m
9	KEK Sei Mangkei	5,6 km
10	Tol Kisaran – Indrapura	8,8 km



Kondisi Lahan

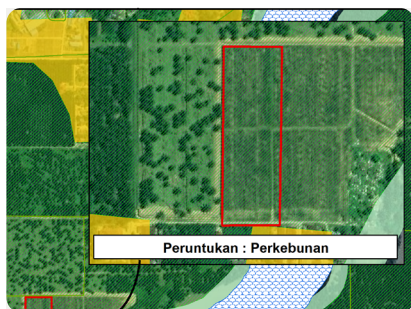


Jalan Lingkungan



Kondisi Lahan





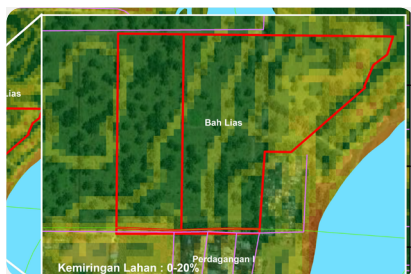
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Perdagangan 1 berada di lahan peruntukan perkebunan dalam RTRW Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031.



LSD

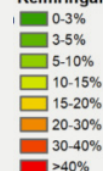
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Untuk Desa Perdagangan 1, kemiringan berada sekitar 0% hingga 20%. Kemiringan 0-10% seluas 1,89 ha, kemiringan 10-15% seluas 0,03 ha, dan kemiringan >15% seluas 0,07 Ha. Kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

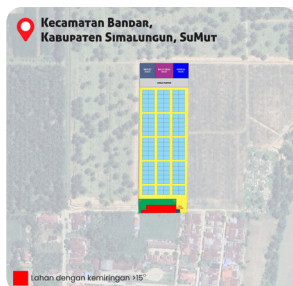
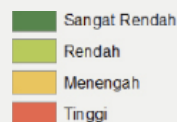
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

Berada di zona risiko gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan.

Zona Risiko Gerakan Tanah

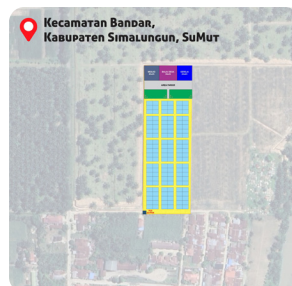


Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan mengikuti kontur (kemiringan <15°)

Luas Lahan	1,96 ha
Jumlah Potensi Rumah	132
Luas Kavling	72m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKUMBANG



Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Simulasi Siteplan pada lahan datar (cut & fill)

Luas Lahan	1,96 ha
Jumlah Potensi Rumah	138
Luas Kavling	72m ²

Mengambil rata-rata luasan rumah subsidi pada website SIKUMBANG

Rekomendasi Strategis

Untuk efisiensi biaya dan kemudahan desain, disarankan memprioritaskan lahan dengan kemiringan $\leq 10\%$ untuk lokasi perumahan ASN, perumahan subsidi, maupun komersil.



Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Kolaka

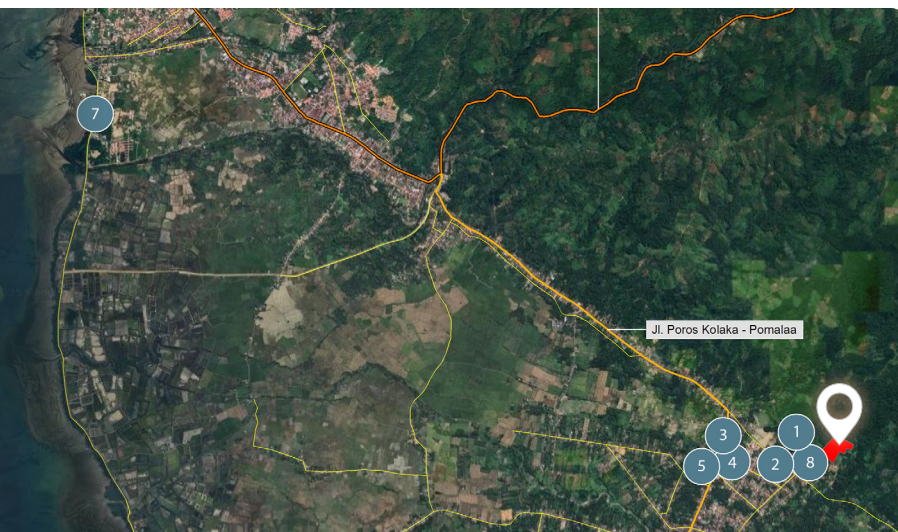
KLK-01

Luas	6,23 Ha
Lokasi	Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Koordinat	4°06'54.0"S 121°41'17.9"E
Status Kepemilikan	Hak Pakai No. 4/2018 a.n. Pemerintah Daerah

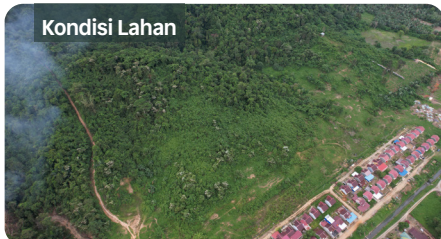
6,23 Ha
Perumahan Subsidi

Jarak ke Fasilitas Umum

1	Kawasan PSN Sekolah Rakyat	0m
2	Kantor Desa Tikonu	800m
3	Kantor Kecamatan Wundulako	1,3 km
4	Puskesmas Wundulako	1,5 km
5	Polsek Wundulako	2,8 km
6	Kantor Bupati Kolaka	10,9 km
7	Rsud SMS Berjaya Kolaka	11,8 km
8	SDN 1 Tikonu	100m
9	Jalan Arteri (Jl. Poros Kolaka-Pomalaa)	1,4km
10	Tambang PT Antam	18.3 km



Kondisi Lahan

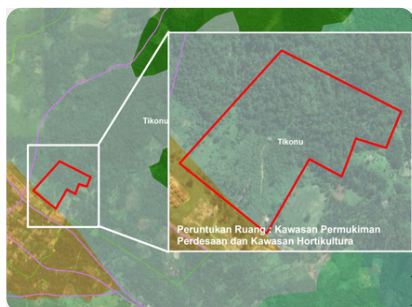


Lokasi PSN Sekolah Rakyat



Kondisi Lahan





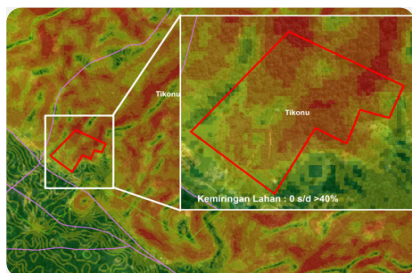
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Tikonu berada di lahan peruntukan permukiman perdesaan dan kawasan hortikultura



LSD

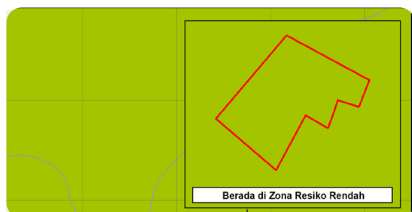
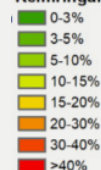
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Tikonu, kemiringan berada sekitar 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan 0-10% seluas 0,17 ha, dan kemiringan 10-15% seluas 0,60 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 5,46 ha.

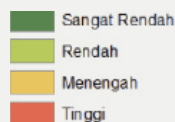
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

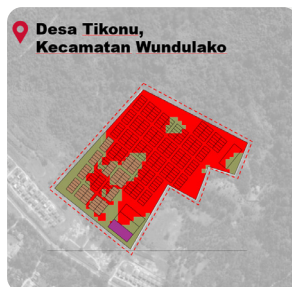
Berada di zona risiko gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan

Zona Risiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Luas	6.23 Ha
Jumlah Potensi Rumah	300 Unit
Luas Kavling	90 m2
Kemiringan Lahan	0%



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Luas	6.23 Ha
Jumlah Potensi Rumah	< 90 Unit
Luas Kavling	90 m2
Kemiringan Lahan	0% - 15%

Rekomendasi Strategis

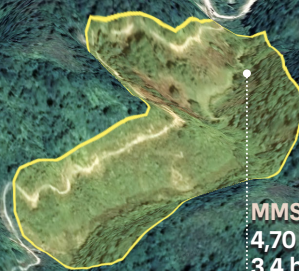
Diperlukan rekayasa teknik untuk lahan dengan kemiringan 8% hingga 15% untuk lokasi perumahan subsidi.



Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Mamasa

MMS-01

Luas	4,70 ha (proposal) 3,4 ha (kml)
Lokasi	Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat
Koordinat	2°55'13"S 119°25'54"E
Status Kepemilikan	3 Bidang dalam Proses Sertifikasi



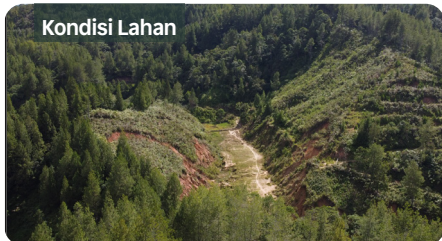
MMS-01
4,70 Ha (proposal)
3,4 ha (kml)
Perumahan ASN

Jarak ke Fasilitas Umum

1	SD Negeri 013 Pena	2,40 km
2	SMP Negeri 2 Mamasa	2,00 km
3	STT (Sekolah Tinggi Teologi) Mamasa	8,90 km
4	Rumah Sakit Banua Mamase	8,60 km
5	Pasar Mamasa	9,30 km
6	Kantor Camat Mamasa	9,70 km
7	Polsek Mamasa	9,40 km
8	Stadion Pongka Padang	3,00 km
9	Kantor Desa Lambanan	1,70 km
10	Jl. Nasional Provinsi Mamasa - Tabang - Tana Toraja	175 m



Kondisi Lahan

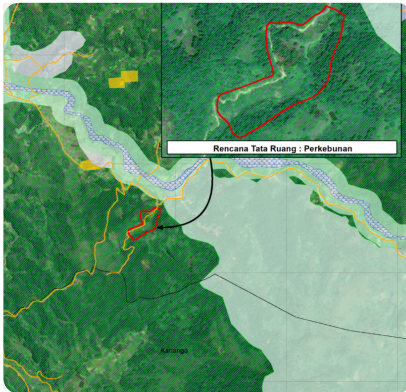


Kondisi Lahan



Kondisi Lahan





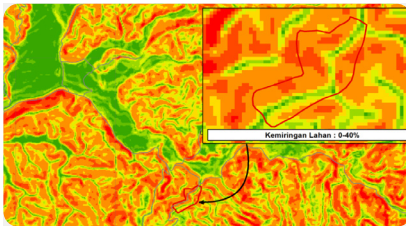
Rencana Tata Ruang

Lahan di desa Lambanan berada di lahan peruntukan perkebunan sesuai RTRW Kabupaten Mamasa tahun 2015-2035. Berdasarkan KUPZ, pembangunan di lahan perkebunan hanya boleh untuk bangunan dan sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan.



LSD

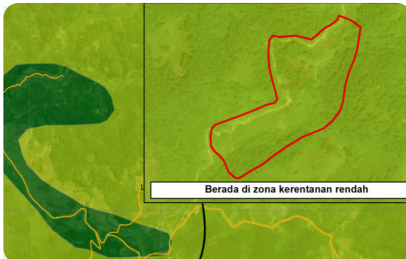
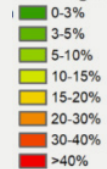
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Lambanan, kemiringan berada sekitar 0% hingga 40%. Kemiringan 0-10% seluas 0,14 ha, kemiringan 10-15% seluas 0,1 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 4,46 ha.

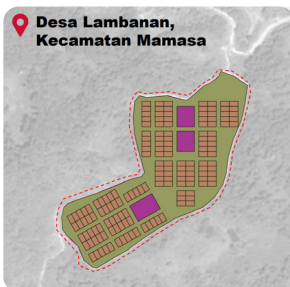
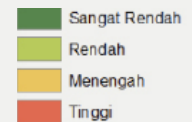
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

zona kawasan rawan gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Tidak ada syarat khusus, namun tetap ikuti tata ruang.

Zona Resiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Tidak Mengikuti Kontur (cut & fill)

Luas	3,41 Ha
Jumlah Potensi Rumah	156 Unit
Luas Kavling	84 m2
Kemiringan Lahan	0%

Rekomendasi Strategis

Diperlukan rekayasa teknik untuk lahan dengan kemiringan 8% hingga 15% untuk pembangunan perumahan ASN.

MMS-07

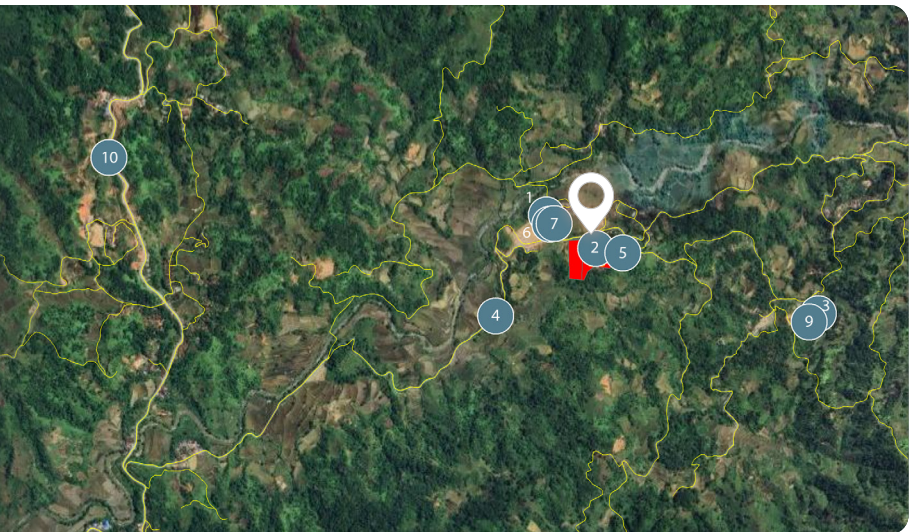
Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Mamasa

Luas	2,00 ha
Lokasi	Desa Buntu Malangka, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat
Koordinat	2°49'47.6"S 119°10'28.2"E
Status Kepemilikan	2 Bidang Hak Milik

MMS-07
2,00 Ha
Perumahan ASN,
Subsidi, Komersi

Jarak ke Fasilitas Umum

1	SMP Negeri 3 Buntu Malangka	1 km
2	SMA Negeri 2 Buntu Malangka	650 m
3	SDK 011 Kebanga	2,5 km
4	Puskesmas Kecamatan Buntu Malangka	1,5 km
5	Gereja Toraja Mamasa Jemaat Ebenehaezer Sodangan	180 m
6	Kantor Desa Buntu Malangka	1 km
7	Kantor Camat Buntu Malangka	950 m
8	Polsek Arelle	8,8 km
9	Lapangan Sepak Bola Desa Kebanga	2,6 km
10	Wisata Tanete leba	5,4 km



Kondisi Lahan

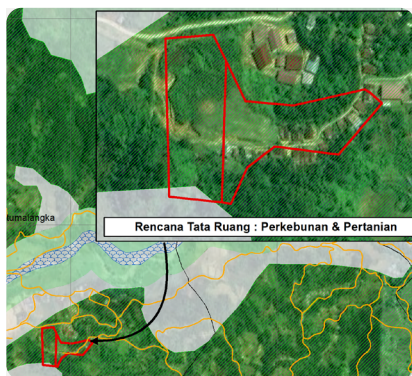


Kondisi Lahan



Kondisi Lahan





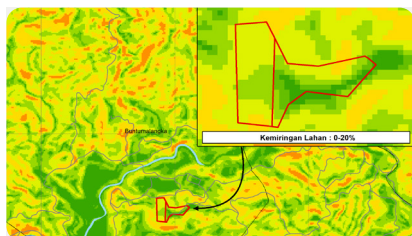
Rencana Tata Ruang

Lahan di desa Buntu Malangka berada di lahan peruntukan perkebunan dan pertanian sesuai RTRW Kabupaten Mamasa tahun 2015-2035. Berdasarkan KUPZ, pembangunan di lahan perkebunan hanya boleh untuk bangunan dan sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan maupun pendukung kegiatan pertanian.



LSD

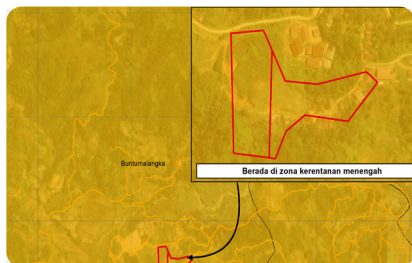
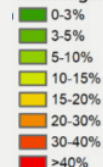
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Buntu Malangka, kemiringan berada sekitar 0% hingga 20%. Kemiringan 0-10% seluas 0,13 ha, kemiringan 10-15% seluas 0,17 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 1,70 ha.

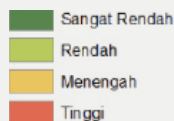
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

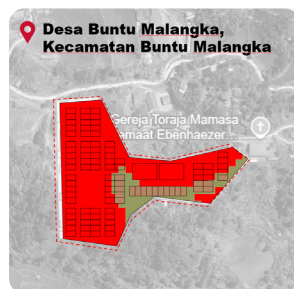
Berada di zona kawasan rawan gerakan tanah level menengah, cukup sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Harus ada studi geoteknik dan rekayasa teknis lereng

Zona Resiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Luas	2 Ha
Jumlah Potensi Rumah	97 Unit
Luas Kavling	84 m2
Kemiringan Lahan	0%



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Luas	2 Ha
Jumlah Potensi Rumah	<20 Unit
Luas Kavling	84 m2
Kemiringan Lahan	0% - 15%

Rekomendasi Strategis

Diperlukan rekayasa teknik untuk lahan dengan kemiringan 8% hingga 15% untuk pembangunan perumahan ASN, perumahan subsidi, maupun komersil.

MMS-09

Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Mamasa

Luas	3,10 ha
Lokasi	Desa Balabatu, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
Koordinat	3°10'19.0"N 99°20'19.6"E
Status Kepemilikan	Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kab. Mamasa

MMS-09
3,10 Ha
Perumahan ASN,
Subsidi, Komersi

Jarak ke Fasilitas Umum

1	SDN 004 Malapanak	1,10 km
2	SMP 4 NEGERI TANDUKKALUA	3,00 km
3	SMK NEGERI 1 TANDUKKALUA	4,00 km
4	SMA PERINTIS SINDAGAMANIK	11,50 km
5	RSUD KONDOSAPATA	12,10 km
6	PUSKESMAS MALABO	7,40 km
7	Gereja Toraja Mamasa Jemaat Malapanak	1,00 km
8	Masjid Nurul Huda	6,20 km
9	Kantor Desa Balabatu	2,40 km

Kondisi Lahan

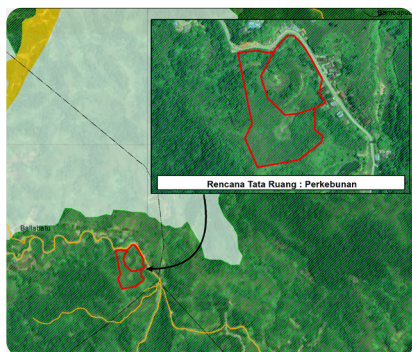


Kondisi Lahan



Kondisi Lahan





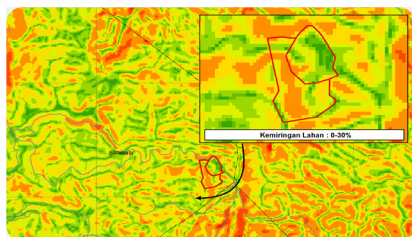
Rencana Tata Ruang

Lahan di Desa Balabatu berada di lahan peruntukan perkebunan sesuai RTRW Kabupaten Mamasa tahun 2015-2035. Berdasarkan KUPZ, pembangunan di lahan perkebunan hanya boleh untuk bangunan dan sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan maupun pendukung kegiatan pertanian.



LSD

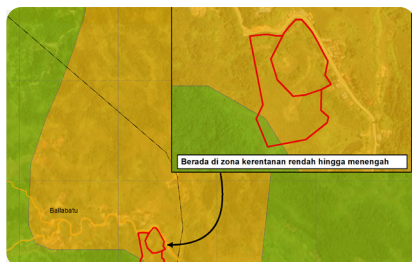
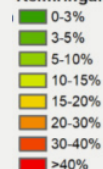
Diluar
Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Balla Batu, kemiringan berada sekitar 0% hingga 30%. Kemiringan 0-10% seluas 0,39 ha, kemiringan 10-15% seluas 0,26 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 2,45 ha.

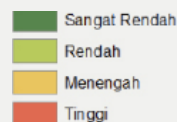
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

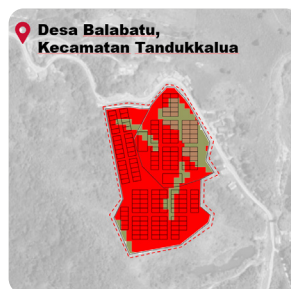
Berada di zona kawasan rawan gerakan tanah level rendah hingga menengah, cukup sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Harus ada studi geoteknik dan rekayasa teknis lereng

Zona Resiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Luas	3.1 Ha
Jumlah Potensi Rumah	158 Unit
Luas Kavling	84 m2
Kemiringan Lahan	0%



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Luas	3.1 Ha
Jumlah Potensi Rumah	<20 Unit
Luas Kavling	84 m2
Kemiringan Lahan	0% - 15%

Rekomendasi Strategis

Diperlukan rekayasa teknik untuk lahan dengan kemiringan 8% hingga 15% untuk pembangunan perumahan ASN, perumahan subsidi, maupun komersil.



Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Kebumen

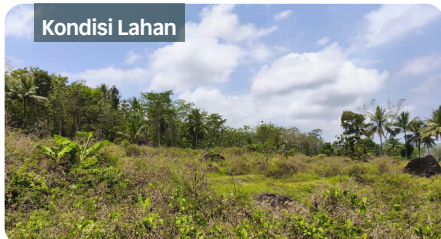
KBM-01

Luas	1,68 ha
Lokasi	Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Koordinat	7°36'51.4"S 109°44'08.9"E
Status Kepemilikan	Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

1,68 Ha
Relokasi Bencana

Jarak ke Fasilitas Umum

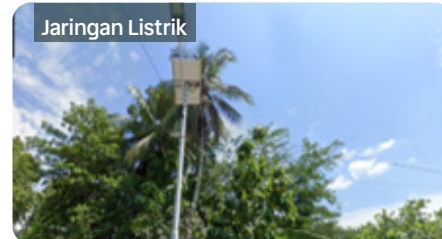
1	SDN 2 Kalirancang	6,70 km
2	SMPN 1 Alian	7,70 km
3	SMAN 1 Kebumen	13,90 km
4	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	13,10 km
5	Stasiun Kebumen Penjer	14,80 km
6	Pasar Pagi Sawangan	6,90 km
7	Kantor Kecamatan Alian	13,30 km
8	Pabrik Geteng Sokka Kebumen	12,60 km



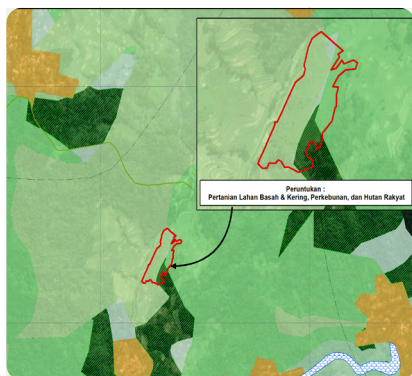
Kondisi Lahan



Jalan Lingkungan

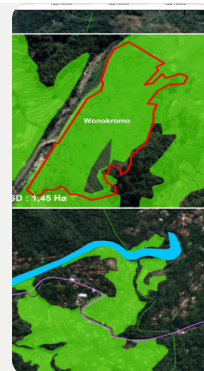


Jaringan Listrik



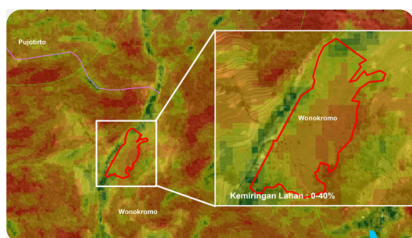
Rencana Tata Ruang

Lahan di desa Wonokromo berada di lahan peruntukan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan hutan rakyat.



LSD

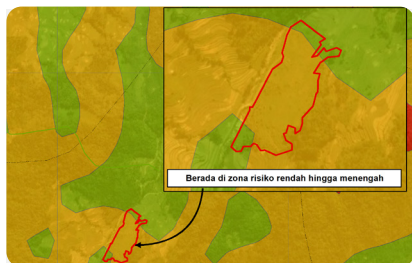
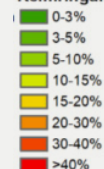
Berada dalam Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Di Desa Wonokromo, kemiringan berada sekitar 0-40%. Kemiringan 0-10% seluas 0,11 ha, dan kemiringan 10-15% seluas 0,25 ha, dan kemiringan diatas 15% seluas 1,32 ha.

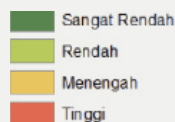
Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

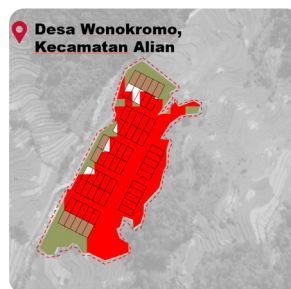
Berada di zona kawasan rawan gerakan tanah level rendah hingga menengah, cukup sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Harus ada studi geoteknik dan rekayasa teknis lereng

Zona Risiko Gerakan Tanah



Simulasi Siteplan Belum Mengikuti Kontur

Luas	1.68 Ha
Jumlah Potensi Rumah	60 Unit
Luas Kavling	78 m2
Kemiringan Lahan	0%



Simulasi Siteplan Sudah Mengikuti Kontur

Luas	1.68 Ha
Jumlah Potensi Rumah	< 15 Unit
Luas Kavling	78 m2
Kemiringan Lahan	0% - 15%

Rekomendasi Strategis

Diperlukan rekayasa teknik untuk lahan dengan kemiringan 8% hingga 15% dan pelepasan LSD untuk relokasi bencana.



Profil Lahan Usulan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

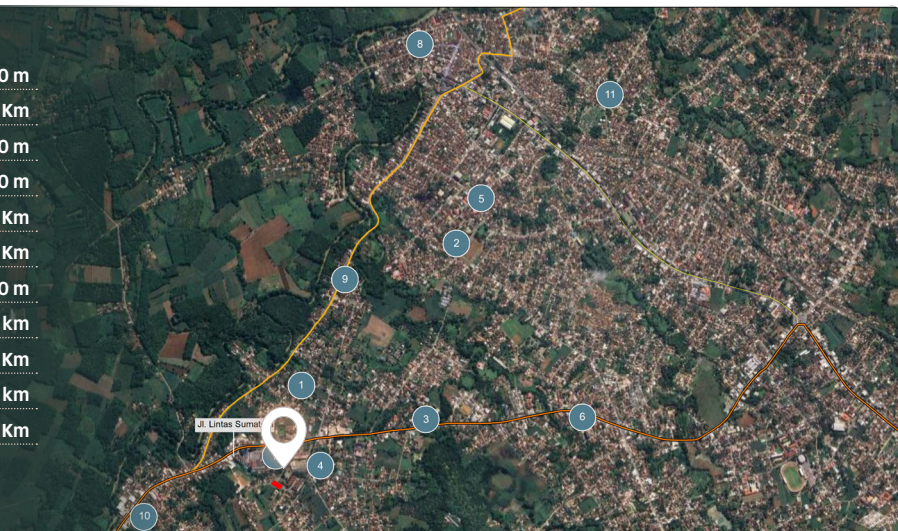
Luas	0,19 ha
Lokasi	Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung
Koordinat	4°50'31.5"S 104°52'12.5"E
Status Kepemilikan	Hak Pakai No. 18/1995 a.n. Pemerintah Daerah Tk. 1 Lampung

LUT-01

LUT-01
0,19 ha
Rusun ASN

Jarak ke Fasilitas Umum

1	SDN 5 Kota Alam	600 m
2	SMPN 3 Kotabumi	1.9 Km
3	SMAN 3 Kotabumi	850 m
4	Poltekkes Kotabumi	450 m
5	Rumah Sakit Maria Regina	2.7 Km
6	RSU Handayani	1.7 Km
7	Pasar Sentral	500 m
8	Pasar Pagi	2.9 km
9	Kantor Kelurahan Kota Alam	1.3 Km
10	Kantor Kecamatan Kotabumi Selatan	3.4 km
11	Polsek Sukabumi	3.9 Km

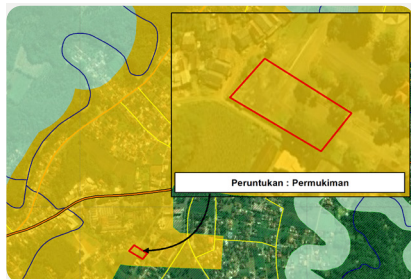


Kondisi Lahan



Kondisi Lahan Eksisting





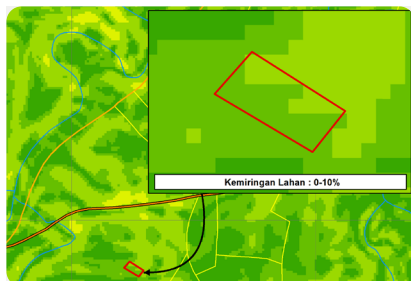
Rencana Tata Ruang

Lahan di Kelurahan Kota Alam berada di lahan peruntukan permukiman sesuai RTRW Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2034.



LSD

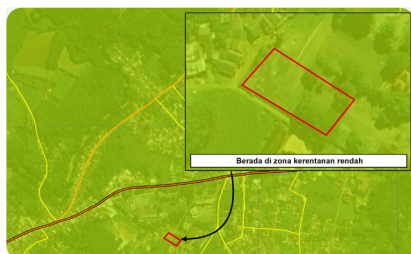
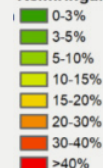
Diluar Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Untuk Kelurahan Kota Alam, kemiringan berada sekitar 0% hingga 10%. Kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

Zona kawasan rawan gerakan tanah level rendah, sangat sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Tidak ada syarat khusus, namun tetap ikuti tata ruang.

Zona Resiko Gerakan Tanah



Rekomendasi Strategis

Lahan direkomendasikan untuk lokasi rusun ASN.

LBT-01

Profil Lahan Usulan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

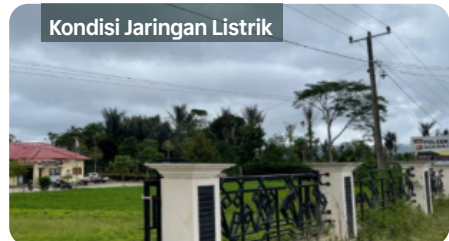
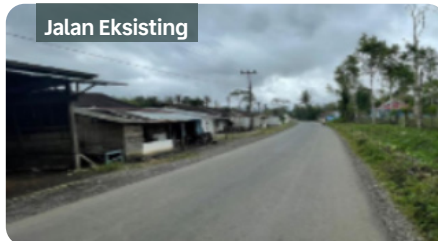
Luas	0,8 ha
Lokasi	Kelurahan Pasir Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten/Kota Lampung Barat
Koordinat	5°00'47"S 104°04'24"E
Status Kepemilikan	- Hak Pakai no. 13/2010 dan - Hak Pakai no. 12/2010 a.n Pemkab Lampung Barat

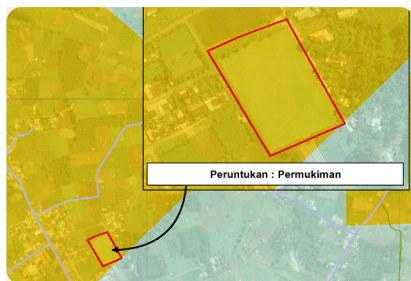
0,8 ha

Rusun ASN

Jarak ke Fasilitas Umum

1	SDN Pantau Liwa	500 m
2	SMPN 2 Liwa	250 m
3	SMAN 2 Liwa	5.7 Km
4	RSUD Alimuddin Umar	4.5 Km
5	Puskesmas Liwa	7.1 Km
6	Pasar Liwa	1.6 Km
7	Pasar Seblak	3.6 km
8	Kantor Bupati Lampung Barat	2.0 Km
9	Kantor Kelurahan Pasar Liwa	2.0 Km
10	Polres Lampung Barat	9.5 km
11	Lapangan Merdeka Liwa	5.1 km





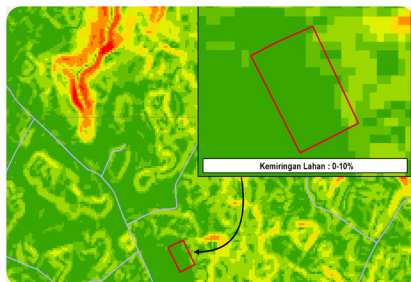
Rencana Tata Ruang

Lahan di Kelurahan Pasar Liwa berada di lahan peruntukan permukiman sesuai RTRW Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2043.



LSD

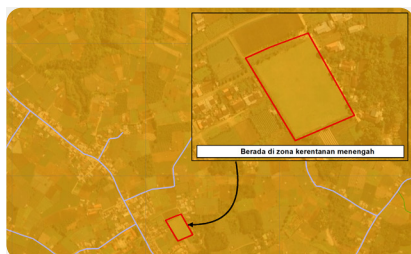
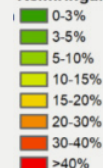
Diluar
Delineasi LSD



Kemiringan Lahan

Untuk Kelurahan Pasir Liwa, kemiringan berada sekitar 0% hingga 10%. Kondisi lahan ini membuat pematangan lahan menjadi minimal.

Kemiringan Lahan



Gerakan Tanah

zona kawasan rawan gerakan tanah level menengah, cukup sesuai untuk perumahan, fasilitas umum, pertanian, dan industri. Harus ada studi geoteknik dan rekayasa teknis lereng

Zona Resiko Gerakan Tanah



Rekomendasi Strategis

Lahan direkomendasikan untuk lokasi rusun ASN.

✦ D. Penutup

Melalui penyusunan Buku Profil Lahan Business Matching 2025 ini diharapkan terbuka peluang kerja sama yang konstruktif antara pemerintah daerah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memanfaatkan potensi lahan yang tersedia. Buku ini diharapkan menjadi panduan dan sarana informasi yang memperkuat pemahaman mengenai potensi aset daerah serta membuka jalan bagi terwujudnya kolaborasi nyata dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap sinergi antara seluruh stakeholders terkait dapat terus ditingkatkan melalui penyusunan berbagai skema pembangunan rumah subsidi yang berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan bersama untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.





Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman